GENDER DAN KELUARGA MIGRAN DI INDONESIA

Togiaratua Nainggolan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Untuk memahami hal itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian diutamakan pada wilayah pemasok utama tenaga kerja wanita (TKW): Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Informan penelitian adalah TKW dan keluarganya. Informasi TKW, selanjutnya dikonfirmasi ke suami, anak, mertua, dan masyarakat atau tokoh lainnya yang dinilai relevan. Penentuan keluarga yang menjadi informan dilakukan dengan snowwball. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pasca migrasi sebagai TKW, terjadi pergeseran pola relasi gender lokal dengan segala hegemoni pathriarkinya. Pergeseran terjadi terutama dari feminin ke androgini sejalan dengan teori skema gender.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja bersama LSM terkait diharapkan dapat memberikan konseling dan atau pelatihan bagi keluarga calon TKW menyangkut pola relasi gender dan persoalan sosial budaya lainnya, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sehubungan dengan kepergian dan kepulangan isteri sebagai TKW, sebagai upaya meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

Kata kunci : *Pergeseran Pola Relasi Gender,Tenaga Kerja Wanita, Keluarga Migran*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan, bahwa para tenaga kerja wanita (TKW) melakukan migrasi ke luar negeri dengan meninggalkan keluarganya. Migrasi ini menimbulkan dampak sosial psikologis terutama bagi perempuan yang sudah menikah. Hal ini mencerminkan adanya kompleksitas masalah pada buruh migran.

Pendapat senada dikemukakan oleh Krisnawati & Safitri (dalam Daulay, 2001) yang mengatakan bahwa masalah buruh migran sangat kompleks karena konteksnya tidak saja soal perburuhan tetapi juga soal migrasi internasional, kapitalisme dunia dan globalisasi, ketimpangan pendapatan negara maju dan negara dunia ketiga, kesalahan konsep pembangunan Indonesia selama 30 tahun, dan secara khusus bagi tenaga kerja wanita (TKW) menyangkut masalah perempuan, yaitu masalah gender.

Selain masalah gender, sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung, perubahan peta situasi pasca keberangkatan tenaga kerja wanita (TKW) dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga buruh migran yang bersangkutan.

Khusus bagi perempuan yang sudah menikah, status buruh migran atau menjadi tenaga kerja wanita (TKW) menimbulkan persoalan tersendiri bagi keberfungsian keluarga yang ditinggalkan. Suami dituntut menjalankan peran ganda dalam mengelola keluarga, terutama dalam menjalankan fungsi pendidikan (pola asuh) bagi anak-anaknya. Dengan kata lain suami dituntut kerelaannya untuk mengurusi sektor domestik yang biasanya menjadi urusan istrinya.

Sementara tenaga kerja wanita (TKW) akan memperoleh pengalaman baru. Pengalaman baru ini diperoleh sehubungan dengan lingkungan baru di tempat kerjanya. Sambil bekerja tenaga kerja wanita (TKW) akan menghadapi budaya baru yang berbeda dengan budaya lingkungan asalnya.

GENDER DAN KELUARGA MIGRAN DI INDONESIA

Togiaratua Nainggolan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Untuk memahami hal itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian diutamakan pada wilayah pemasok utama tenaga kerja wanita (TKW): Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Informan penelitian adalah TKW dan keluarganya. Informasi TKW, selanjutnya dikonfirmasi ke suami, anak, mertua, dan masyarakat atau tokoh lainnya yang dinilai relevan. Penentuan keluarga yang menjadi informan dilakukan dengan snowwball. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pasca migrasi sebagai TKW, terjadi pergeseran pola relasi gender lokal dengan segala hegemoni pathriarkinya. Pergeseran terjadi terutama dari feminin ke androgini sejalan dengan teori skema gender.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja bersama LSM terkait diharapkan dapat memberikan konseling dan atau pelatihan bagi keluarga calon TKW menyangkut pola relasi gender dan persoalan sosial budaya lainnya, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sehubungan dengan kepergian dan kepulangan isteri sebagai TKW, sebagai upaya meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

Kata kunci : *Pergeseran Pola Relasi Gender,Tenaga Kerja Wanita, Keluarga Migran*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan, bahwa para tenaga kerja wanita (TKW) melakukan migrasi ke luar negeri dengan meninggalkan keluarganya. Migrasi ini menimbulkan dampak sosial psikologis terutama bagi perempuan yang sudah menikah. Hal ini mencerminkan adanya kompleksitas masalah pada buruh migran.

Pendapat senada dikemukakan oleh Krisnawati & Safitri (dalam Daulay, 2001) yang mengatakan bahwa masalah buruh migran sangat kompleks karena konteksnya tidak saja soal perburuhan tetapi juga soal migrasi internasional, kapitalisme dunia dan globalisasi, ketimpangan pendapatan negara maju dan negara dunia ketiga, kesalahan konsep pembangunan Indonesia selama 30 tahun, dan secara khusus bagi tenaga kerja wanita (TKW) menyangkut masalah perempuan, yaitu masalah gender.

Selain masalah gender, sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung, perubahan peta situasi pasca keberangkatan tenaga kerja wanita (TKW) dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga buruh migran yang bersangkutan.

Khusus bagi perempuan yang sudah menikah, status buruh migran atau menjadi tenaga kerja wanita (TKW) menimbulkan persoalan tersendiri bagi keberfungsian keluarga yang ditinggalkan. Suami dituntut menjalankan peran ganda dalam mengelola keluarga, terutama dalam menjalankan fungsi pendidikan (pola asuh) bagi anak-anaknya. Dengan kata lain suami dituntut kerelaannya untuk mengurusi sektor domestik yang biasanya menjadi urusan istrinya.

Sementara tenaga kerja wanita (TKW) akan memperoleh pengalaman baru. Pengalaman baru ini diperoleh sehubungan dengan lingkungan baru di tempat kerjanya. Sambil bekerja tenaga kerja wanita (TKW) akan menghadapi budaya baru yang berbeda dengan budaya lingkungan asalnya.

Ditempat yang baru tenaga kerja wanita (TKW) akan menerima nilai-nilai baru dalam hidupnya, yang ditopang dengan peningkatan taraf hidup sehubungan dengan bertambahnya penghasilan.

Sejalan dengan interaksinya dengan keluarga majikan dan masyarakat sekitar, tenaga kerja wanita (TKW) akan melihat gaya (pola) hidup yang berbeda, termasuk dalam hal relasi gender.

Keberhasilan perjuangan para tenaga kerja wanita (TKW) di perantauannya, pada gilirannya akan memperkuat posisi tawar mereka. Dalam kondisi demikian, kepulangan tenaga kerja wanita (TKW) ke negeri asalnya di Indonesia dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga buruh migran yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelalasan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana gambaran pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai tenaga kerja wanita (TKW)?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis dan teoritas, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi perumusan kebijakan dan acuan bagi praktisi yang bergerak dalam penanganan gender dan buruh migran.
2. Acuan untuk bahan penelitian lanjutan tentang gender dan buruh migran.

E. Kerangka Konsep

1. Pengertian gender

Manusia dalam kehidupannya sering dibedakan dalam suatu dikotomi dari segi biologisnya menjadi laki-laki dan perempuan. Secara psikologis dikotomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan merupakan hal yang relevan dalam memahami fenomena perilaku manusia. Hal ini dapat terjadi karena anak-anak telah diperlakukan secara dikotomi dari waktu ke waktu semenjak umur satu atau dua tahun (Bem, 1975).

Misalnya dalam hal mainan dan pakaian yang diberikan oleh orangtua, dan dari pengamatan anak-anak terhadap para orangtua dalam stereotip gender ibu sebagai pengurus rumah tangga dan ayah sebagai pencari nafkah.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa perkembangan gender sudah berjalan sejak bayi dilahirkan. Ketika bayi dilahirkan, orangtua dengan segera memberikan label kepada bayi tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya. Label yang diberikan oleh orangtua tersebut akan mencerminkan dan mempengaruhi harapan-harapan orangtua terhadap anak dan tingkah lakunya dikemudian hari. Label-label tersebut berasal dari stereotip gender yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya stereotip gender ini berfungsi sebagai standar untuk menilai tingkah laku individu apakah tepat atau tidak dengan jenis kelaminnya. Jadi sejak kecil seseorang sudah diajarkan untuk bertingkah laku sesuai dengan standar gender tersebut.

Mc Kee & Sheriffs (dalam Nainggolan, 2002) menyebut gender sebagai segala sifat, sikap dan perilaku yang diyakini menggambarkan laki-laki dan perempuan. Sementara Eysenck dkk (1972) mendefenisikan gender sebagai perilaku spesifik yang diharapkan dan dijadikan standar yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan, dimana penyimpangan subjek dari ketentuan ini akan mendapatkan sanksi sosial (penilaian negatif).

Ini berarti bahwa gender mengarah pada perilaku, sikap dan peranan-peranan sosial yang oleh masarakat tertentu dianggap cocok untuk jenis kelamin tertentu. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Rogers (1985) yang menjelaskan bahwa gender menunjukkan pola tingkah laku yang cocok untuk tiap-tiap jenis kelamin.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh D' Andrade (dalam Eysenck dkk, 1972) yang menyatakan bahwa gender adalah suatu sifat yang sebenarnya dapat dipelajari untuk meningkatkan aktivitas yang sesuai dengan harapan masyarakat tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Sementara Lamke (1982) menjelaskan bahwa gender adalah stereotip yang dimliki oleh manusia berupa sifat maskulin dan feminin. Sifat ini dimiliki manusia sejak kecil, hanya saja penampilannya berbeda.

Secara tradisional perbedaan seks dipandang dari kondisi laki-laki dan perempuan yang inklusif memiliki sifat maskulin dan feminin (Kaplan & Bean, 1976). Digambarkan bahwa sifat maskulin dan feminin itu bertolak belakang. Hal yang sama dikemukakan oleh Bem (1975b) yang menjelaskan bahwa bertahun-tahun masyarakat Amerika berpendapat bahwa maskulinitas dan femininitas merupakan tanda bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kondisi psikologis yang sehat.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ward (dalam Hurlock, 1999) menjelaskan bahwa sebelum pertengahan tahun 1970-an pendefenisian gender hanya diartikan sebagai suatu gambaran dari tingkah laku dan sikap-sikap yang secara umum telah disetujui sebagai tingkah laku maskulin dan feminin saja. Anak laki-laki diharapkan akan selalu mempunyai sifat maskulin dan anak perempuan mempunyai sifat feminin.

Akan tetapi akhir-akhir ini diyakini bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan lebih dari sekedar maskulin dan feminim yang dapat menggambarkan kualitas gender seseorang. Bem (1974,1977) dan Spence & Helmreich (1978) mengistilahkan hal ini sebagai androgini, yang berarti kombinasi antara sifat-sifat maskulin dan feminim pada diri seseorang. Seorang anak yang androgini dapat seorang anak laki-laki atau perempuan yang maskulin sekaligus feminin.

Selanjutnya berdasarkan penelitian Spence, dkk (dalam Bem, 1977) juga ditemukan sifat lain di samping maskulin, feminin dan androgini, yaitu sifat yang tidak tergolongkan ke dalam tiga sifat di atas. Kelompok ini disebut dengan tak tergolongkan. Sifat tak tergolongkan ini adalah sifat yang berlawanan dengan androgini. Artinya kalau androgini mencakup sifat maskulin dan feminin yang dominan (tinggi), maka sifat tak tergolongkan mencakup sifat maskulin dan feminin yang tidak dominan (rendah).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa berbeda dengan jenis kelamin, gender terbentuk karena belajar dan dari pengalaman individu dalam hubungannya dengan orang lain, dan berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan pengalaman seseorang melalui interaksi sosial yang dijalaninya.

Adams (1976) dan Rice (1981) mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas gender seseorang , yaitu ; orangtua, saudara kandung, sekolah, teman sebaya dan media massa. Berdasarkan pendapat kedua ahli ini dapat dipahami bahwa perkembangan identitas gender seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk di dalamnya aspek sosial budaya, mulai dari lingkungan keluarga (internal) hingga lingkungan eksternal.

Nainggolan (2002) mengemukakan 4 teori yang menjelaskan pembentukan dan perkembangan gender sebagai berikut :

a) Teori psikoanalisis

Teori ini menjelaskan pembentukan dan perkembangan gender dengan menekankan pada pengidentifikasian terhadap orangtua yang berjenis kelamin sama sebagai mekanisme yang menjadikan seseorang menjalani *sex-typed*. Hasil identifikasi ini ditemukan seseorang dari perbedaan genital jenis kelamin.

b) Teori belajar sosial

Menurut teori ini yang mendorong seseorang untuk belajar adalah lingkungan sosial eksternal, bukan motif-motif internal. Teori ini menekankan

pentingnya peranan *modelling* dan *reinforcement* dalam pembentukan gender yang meletakkan sumber *sex-typing* pada latihan membedakan jenis kelamin dalam komunitas masyarakat.

c) Teori perkembangan kognitif

Pemahaman seseorang akan gender akan muncul melalui kesadaran kognitif yang sudah tumbuh sebelumnya. Mereka menggolongkan diri mereka sebagai laki-laki dan perempuan dan memperhatikan bagaimana anggota dari kedua kelompok tersebut bertingkah laku. Dengan kata lain mereka melakukan kategorisasi terhadap dirinya sendiri sebagai perempuan dan laki-laki.

d) Teori skema gender

Teori ini menggabungkan aspek-aspek terpenting dari teori belajar sosial dengan teori perkembangan kognitif dalam suatu kerangka mental untuk mengolah informasi sehubungan dengan kualitas perasaannya sebagai laki-laki. Kerangka ini berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, tergantung kepercayaan masing-masing masyarakat mengenai kualitas laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana halnya teori perkembangan kognitif, teori ini berpegang pada tipe gender diakibatkan oleh proses mental seseorang, tetapi seperti teori belajar juga memandang skema itu dibangun dari pengalaman seseorang itu di dalam masyarakat.

2. Keluarga migran di Indonesia

a) Konsep Keluarga

Keluarga menjadi media utama dan pertama dalam pembentukan karakter individu. Di dalam keluarga terjadi transfer berbagai pesan moral yang akan dijadikan modal oleh setiap anggota keluarga untuk berinteraksi dengan dunia yang lebih luas dari keluarga.

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1992 (tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera), keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang memiliki karekteristik : (1) mempunyai tempat tinggal bersama, (2) mengatur ekonomi bersama, (3) melakukan reproduksi, (4) di dalamnya terdapat orang-orang dewasa dari kedua jenis kelamin, paling sedikit dua orang, (5) memelihara hubungan seksual yang dibenarkan secara sosial, dan (6) memiliki satu atau lebih anak, baik anak sendiri maupun mengadopsi.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga tidak bisa terlepas dari sub sistem-sub sistem yang terdiri dari suami-istri, orangtua-anak, dan antar anak. Ketiga sub sistem tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini suami-istri atau orangtua menjadi penentu agar hubungan antar sub sistem dapat terjalin relasi dengan baik.

Kartika (2005) menjelaskan terdapat 3 bentuk hubungan suami-istri :

- *Owner property*, suami mencari uang dan istri di rumah menjaga anak-anak dan menyelesaikan urusan rumah tangga.
- *Head comlpement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami, dan suami diharapkan akan memenuhi kebutuhan istri dan tetap dapat menyenggarakan kegiatan bersama dan suami mau membantu istri jika istri membutuhkan.
- *Equal partner*, baik suami maupun istri, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, begitu juga pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Suami bukan hanya menjadi pencari nafkah, tetapi peran istri sebagai pencari nafkah juga diperhitungkan.

Bentuk hubungan yang akan dipilih, akan mempengaruhi bagaimana cara menjalankan fungsi *parenting* dan juga dimensi kesejahteraan keluarga yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penyadaran relasi sosial, partisipasi sosial dalam komunitas, investasi dan aset keluarga, serta keikutsertaan mereka

dalam pengambilan keputusan dalam komunitas.

Pada masyarakat patrilineal, bentuk hubungan suami-istri yang dipilih cenderung pada *owner property* dan *head complement*. Seorang suami menjalankan figur sebagai seorang ayah yang mempunyai kedisiplinan, kewibawaan serta keadilan (*remote figure*). Walaupun pada saat ini citra ayah sebagai figur yang mempunyai wibawa dan kedisiplinan sudah mulai *ter-erosi*. Sedangkan istri menjalankan figur seorang ibu, yang dalam prosesnya akan membentuk hubungan yang khusus antara ibu dan anak. Akibatnya ibu akan menjadi objek lekat (*attachment object*) atau tambatan hati utama si anak.

b) Keluarga migran

Secara umum migran yang ada di Indonesia dapat dikaklasifikasikan atas dua kategori, yaitu migran antar wilayah yang terjadi di dalam negeri, dan migran yang terjadi antar negara. Karakteristik migran yang terjadi di Indonesia didominasi oleh migran yang datang dari desa menuju kota. Hal ini sangat mudah dipahami mengingat adanya daya tarik yang kuat dari kota, dan didukung oleh faktor budaya etnik yang mengembangkan budaya merantau.

Migran antar negara yang terjadi di Indonesia juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaku. Salah satu diantaranya dikaitkan dengan faktor ekonomi berupa lapangan kerja di luar negeri. Tipologi migran ini populer dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dan khusus untuk perempuan dikenal dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Sebagaimana dikemukakan oleh Krisnawati & Safitri (dalam Daulay, 2001) bahwa masalah buruh migran sangat kompleks karena konteksnya tidak saja soal perburuhan tetapi juga soal migrasi internasional, kapitalisme dunia dan globalisasi, ketimpangan pendapatan negara maju dan negara dunia ketiga, kesalahan konsep pembangunan Indonesia selama 30 tahun, dan secara khusus bagi tenaga kerja wanita (TKW) menyangkut masalah perempuan, yaitu masalah gender.

Lebih jauh dijelaskan bahwa masalah migrasi internasional telah menjadi kajian hubungan antar negara dan hukum perburuhan internasional. Permasalahan lain adalah adanya perubahan struktur yang membawa dampak pada sistem keluarga secara keseluruhan.

Pada umumnya tenaga kerja wanita (TKW) berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang minim dan dari daerah yang mempunyai sumber daya alam yang rendah dengan daya serap tenaga kerja ang rendah pula.

Karena tuntutan ekonomi, mereka (baik dengan kesadaran sendiri maupun karena keterpaksaan) memilih menjadi tenaga kerja wanita. Mereka menjadi alat produksi keluarga dengan mengirimkan gaji mereka kepada keluarga yang tinggal di kampung halaman. Dalam hal ini terjadi pertukaran peran, dimana istri menjadi pencari nafkah. Hal ini bisa terjadi didasari oleh beberapa kemungkinan sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow (dalam Depsos RI, 2004) sebagai berikut :

- Pengangguran bagi pencari nafkah utama
- Keambrukan keluarga
- Beberapa fungsi keluarga tidak bisa berjalan sehingga ketahanan keluarga melemah
- Kesulitan pengelolaan keuangan
- Hilangnya mata pencaharian yang menyebabkan hilangnya pendapatan keluarga
- Suami atau istri ditinggalkan
- Suami atau istri menjadi *single parent*
- Perlakuan kasar terhadap istri/suami
- Terjadi perceraian

2. Pola relasi gender di Indonesia dan pergeserannya

Istilah relasi gender dapat disamakan dengan hubungan atau interaksi gender, yaitu interaksi sosial dalam perspektif gender. Interaksi tersebut terjadi didasarkan pada sekumpulan aturan, tradisi kelompok masyarakat yang memutuskan apa saja yang dianggap bersifat kewanitaan (feminin) atau kelelakian (maskulin). Dengan kata lain, relasi gender akan menentukan aktivitas apa yang dianggap layak dilakukan oleh wanita dan apa yang layak dilakukan oleh laki-laki.

Secara empiris masyarakat Indonesia hidup dalam keanekaragaman budaya, baik dari segi etnik, agama maupunn aspek lainnya. Sejalan dengan keanekaragaman tersebut, interaksi sosial masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar nilai-nilai yang diyakini sebagai bagian dari pedoman atau pandangan hidup bagi masyarakat yang bersangkutan, termasuk dalam hal relasi gender.

Secara umum pola relasi gender di Indonesia didasarkan pada budaya kesukuan (terutama adat istiadat) yang sudah berlangsung lama secara turun temurun sebagai bagian dari pewarisan budaya. Oleh sebab itu konsepsi dan perilaku gender berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya, walaupun dalam beberapa hal masih ditemukan beberapa persamaan secara relatif.

Warisan budaya berupa konsep relasi gender lokal berasal dari masa lalu. Menurut Stompka (2005) warisan sosial tersebut dapat berubah, dibentuk ulang atau dimodifikasi dalam kehidupan berikutnya. Perubahan tersebut dapat berlangsung sejalan dengan interaksi sosial yang dijalani dalam setiap sistem sosial, sehingga perilaku seseorang merupakan produk dari sistem sosial yang dijalaninya.

Perubahan (pergeseran) relasi gender ini dapat berlangsung melalui proses transmisi budaya sebagaimana dijelaskan oleh Cavalli-Sporza & Feldman (dalam Berry dkk, 1999) sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

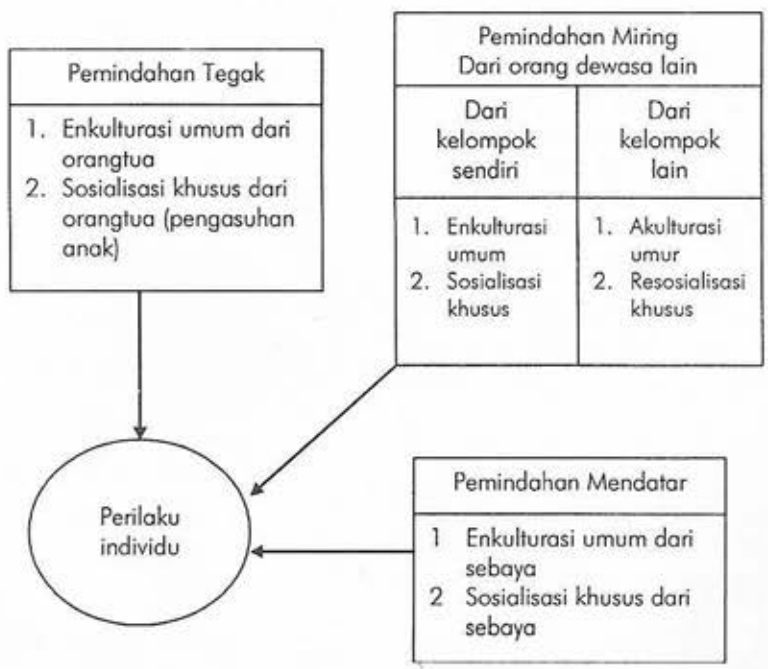

Gambar 1 : Bentuk Pergeseran Pola Relasi Gender Melalui Proses Transmisi Budaya, Dimodifikasi dari Model Berry & Cavally-Sporza (dalam Berry dkk, 1999)

Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh oleh Cavalli-Sporza & Feldman pada tahun 1981 untuk disejajarkan dengan konsep pewarisan biologis (*biological transmission*) melalui mekanisme genetik. Dalam hal ini pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya selanjutnya diistilahkan dengan pewarisan tegak (*vertical transmission*) karena melibatkan penurunan ciri-ciri budaya dari orangtua ke anak cucu.

Berdasarkan konsep pewarisan budaya mendatar seseorang belajar dari dari teman sebaya semasa dalam proses perkembangan sejak lahir hingga dewasa. Sementara dalam proses pewarisan budaya miring seseorang belajar dari orang dewasa lain, lembaga-lembaga lain tanpa memandang hal itu terjadi dalam budaya sendiri atau budaya lain.

Sementara jika proses itu terjadi dalam budaya sendiri disebut dengan enkulturasi atau sosialisasi. Jika proses itu melalui kontak dengan budaya lain, maka proses itu disebut dengan akulturasi atau resosialisasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tahun 2006, sebagai bagian dari Program Pusat Penelitian dan Pengembangangan Kesejahteraan Sosial-Departemen Sosial RI. Prosedur penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian adalah daerah pemasok utama tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung.

Informan penelitian adalah mantan TKW. Informasi tersebut selanjutnya dikonfirmasi ke suami, anak, mertua, masyarakat atau tokoh lainnya yang dinilai relevan. Pengambilan keluarga yang menjadi informan dilakukan dengan cara *snowball* dimana data dikumpulkan dari satu informan berkembang ke informan yang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Tenaga kerja wanita (TKW) pada wilayah penelitian umumnya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, sumber daya alam yang kurang memadai dan dengan daya serap tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga terkait dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah, dan ketrampilan yang kurang.

Pada umumnya negara tujuan adalah Malaysia dan Arab Saudi. Di sana mereka bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga dengan masa kontrak rata-rata 2 sampai 4 tahun. Mereka berangkat menjadi TKW atas persetujuan suami.

Secara umum, pola relasi gender lokal pada wilayah penelitian sangat kental dengan warna tradisi, adat istiadat atau budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini budaya patriarkhi sangat dominan, dimana perempuan ditempatkan sebagai *sub ordinat* dari hegemoni kekuasaan laki-laki.

Untuk wilayah Lampung TKW-nya didominasi oleh penduduk pendatang, terutama yang berasal dari Pulau Jawa (etnik Jawa dan Sunda). Namun mereka sudah mengaku sebagai penduduk asli Lampung karena sudah mendiami wilayah ini sejak beberapa generasi. Dengan demikian budaya mereka pun sudah berinteraksi dengan budaya penduduk asli Lampung (jelma Lampung) termasuk dalam hal pola relasi gender.

Bagi etnik Sunda di Jawa Barat, relasi sosial gender tetap memandang perbedaan jenis kelamin sebagai standar dimana posisi kaum perempuan menjadi kelompok dependen terhadap laki-laki.

Jawa Timur sangat kental dengan tradisi absolutisme, dimana kekuasaan terpusat pada Raja. Dalam proses konstruksi budaya Jawa, hal ini terinternalisasikan dalam kehidupan berumah tangga masyarakat, dimana suami mempunyai kedudukan yang dominan.

Budaya Makassar, Bugis dan etnik lainnya di Sulawesi Selatan, secara umum memandang bahwa laki-laki harus menjadi pemberani dan harus ikut membantu ayah mencari nafkah. Sedangkan anak perempuan harus membantu ibunya dalam tugas domestik di rumah agar kelak terbiasa.

Budaya kesukuan dalam berbakai kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat tetap memandang laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sementara ibu dan kaum perempuan harus mengurus rumah tangga.

B. Realitas TKW Sebagai Persoalan Sosial Budaya

Sebagai sebuah realita sosial, kehadiran TKW pada wilayah penelitian banyak mendapat pujian masyarakat sehubungan dengan prestasinya dalam bidang ekonomi dengan sumbangan devisa yang besar, sehingga TKW diberikan predikat sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan pahlawan devisa negara. Namun, pujian dan predikat pahlawan ini dapat dikatakan semu, karena prestasi ini hanya dinilai berdasarkan indikator ekonomi, sehingga terkesan *meninabobokan* masyarakat terhadap substansi persoalan yang sesungguhnya dan cenderung menutupi kelemahan pihak tertentu sebagai penyelenggara program ini.

Penegasan ini cukup beralasan karena hingga saat ini program pengiriman TKW ke luar negeri terlalu didominasi motif pendekatan bisnis yang didefinisikan secara bebas sesuai dengan selera kepentingan kelompok *kapitalis*. Akibatnya, prinsip hitung-hitungan ekonomi selalu menjadi ukuran. Dalam prakteknya, bagi kaum kapitalis menjadi TKW adalah menjadi "produsen" sekaligus menjadi "konsumen" dengan ukuran-ukuran yang dikonstruksi oleh kelompok pengusaha.

Pengiriman tenega kerja keluar negeri perlu dipandang sebagai persoalan sosial budaya dalam arti luas. Selain peluang yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, juga harus memanfaatkan peluang dari aspek sosial budaya. "Mengekspor" TKW ke luar negeri bukan saja megirim individu TKW secara fisik, tetapi sekaligus mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari berbagai aspek.

Mengacu pada model transmisi budaya dari Cavali dan Sproza (dalam Berry dkk, 1999) pertemuan antara TKW dengan majikan dan lingkungan sosialnya yang baru di negara tujuan sekaligus mempertemukan dan memfasilitasi kontak budaya dua pihak yang mengadakan transaksi jasa. Hal ini potensial memunculkan persoalan budaya dalam bentuk akulturasi dan enkulturasi budaya dengan segala konsekuensi lintas budaya, baik yang positif maupun negatif.

Budaya lokal yang diperoleh TKW melalui pewarisan tegak (*vertical transmission*) di negeri asalnya di Indonesia berinteraksi dengan budaya baru di negara perantauannya sehingga mengalami resosialisasi dalam bentuk pewarisan budaya mendatar dan pewarisan budaya miring.

Fenomena ini lebih sensitif lagi karena melibatkan perempuan yang berstatus istri dari seorang suami, dan sekaligus ibu dari sejumlah anak. Bahkan secara politis adalah "ibu" dari sang masa depan bangsa. Hal yang harus menjadi catatan pertama adalah kepergian seorang ibu ke luar negeri tidak serta merta menyelesaikan masalah keluarganya. Justru sebaliknya dapat memunculkan masalah baru dalam konteks keluarga yang senantiasa tetap dituntut menjalankan fungsinya, yang secara ideal harus dikendalikan oleh suami-istri. Hal senada dipertegas oleh Goode (1985), bahwa dengan bekerjanya sang istri ternyata meningkatkan pertentangan dalam perkawinan. Pernyataan ini semakin relevan bagi TKW karena harus berpisah dengan keluarganya.

Secara bersamaan, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi (termasuk menjadi TKW) dapat dilihat dari dua sisi. Pada satu sisi, mengindikasikan peningkatan secara kuantitatif, dimana jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah semakin banyak, walaupun angka statistiknya belum dapat disebut secara pasti. Sementara pada sisi lain ada peningkatan jumlah bidang pekerjaan yang semula didominasi oleh laki-laki secara berangsur dimasuki bahkan didominasi oleh perempuan, walaupun secara kualitatif hal itu terjadi pada pekerjaan kasar sebagaimana yang dialami oleh TKW.

Pada tataran global, perubahan kontemporer dalam hidup kaum perempuan ini, sebenarnya sudah dimulai pada saat modernisme menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan ideology masyarakat. Dalam konteks ini beban menjadi perempuan di era modern menjadi lebih berat, karena berbagai muatan nilai harus diakomodasi. Sadar atau tidak *trend* kehidupan mengikuti arus perubahan sosial membawa transformasi masyarakat yang melibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional ke arah modernisasi, termasuk di kalangan buruh migran.

Perilaku penyesuaian diri dalam menerima arus informasi modernisasi dalam transmisi budaya menuntut kearifan tersendiri. Persepsi yang salah dapat menimbulkan *culture shock* berupa respon negatif atau *disorientasi*, yang dialami orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya baru.

Bagi TKW yang harus pergi ke luar negeri, persoalan semacam ini seharusnya menjadi fokus perhatian dalam perumusan kebijakan, bukan saja pada tingkat mikro, akan tetapi juga pada tingkat makro.

Secara makro, proses globalisasi telah membawa keuntungan atas fenomena "perdagangan tanpa batas" dengan mendapatkan pekerja migran yang murah. Secara tidak langsung buruh migran diekploitasi di dalam negeri sekaligus di negara tujuan.

Pada tingkat mikro, pemerintah memang melakukan intervensi. Tetapi hal itu lebih ditujukan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan aliran modal yang justru mendukung globalisasi itu sendiri, tetapi tidak untuk misi kemanusiaan yang melekat pada proses migrasi itu sendiri. Akibanya muncul berbagai efek samping yang justru tidak diharapkan.

Pada tataran inilah aspek sosial budaya dari program ekspor tenaga kerja ke luar negeri menjadi hal yang urgen untuk menjadikan TKW sebagai duta bangsa yang membawa nama harum bangsa, dan bukan menjadi "komoditas dagang" yang mendapat perlakuan sesuai selera pasar.

C. TKW dan Pergeseran Pola Relasi Gender

Sebagai bagian dari budaya, pola relasi gender lokal menunjukkan kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang domesik. Kecenderungan ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin.

Pengaruh akar sosial budaya tradisional dalam mengasosiasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu telah memberi warna dalam keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Pemaknaan keteribatan perempuan dalam kegiatan ekonomi ini ditentukan oleh sistem nilai adat istiadat yang memberikan peluang sekaligus pembatasan berupa etika, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Proses sosialisasi perempuan pada umumnya mengarah pada terjadinya identifikasi pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat keperempuananya. Terlihat bahwa perempuan banyak dilibatkan di sektor-sektor yang sudah terpola pada pekerjaan yang bersifat "menerima perintah". Kecenderungan ini terefleksikan dalam konteks yang lebih luas, dimana pihak yang memerintah adalah laki-laki, dan pihak yang menerima perintah adalah perempuan. Selain itu, perempuan sebagai pihak yang menerima perintah, di dalam struktur kekuasaan berada pada posisi yang lemah dan terlihat jelas dengan adanya hubungan-hubungan personal yang mempengaruhi ukuran-ukuran kedudukan dan kesempatan. Kontruksi gender ini menempatkan laki-laki pada ujung yang satu dan perempuan pada ujung yang lain disebuah garis vertikal. Secara langsung konstruksi ini menegaskan posisi sub ordinat perempuan dan superioritas laki-laki.

Penjelasan tersebut menunjukkan betapa hegemoni *patriarkhi* melingkupi pola relasi gender lokal. Dalam konteks ini, pembagian kerja menjadi *sexist* (didasarkan pada jenis kelamin) dan dibedakan dalam suatu dikotomi dari waktu ke waktu. Relasi gender menjadi perilaku spesifik yang diharapkan dan dijadikan standar yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan, dimana penyimpangan subjek dari ketentuan ini akan mendapatkan sanksi sosial (penilaian negatif) masyarakat. Dengan kata lain, pola relasi gender ini merupakan tingkah laku yang cocok untuk tiap-tiap jenis kelamin. Dalam hal ini, kelompok laki-laki diharapkan akan menjadi maskulin dan perempuan diharapkan menjadi feminim.

Bagi kaum perempuan, khususnya yang kebetulan menjadi TKW, pergeseran nilai ini justru semakin berpeluang terjadi. Konstruksi gender lokal yang dibawa dari daerah atau negara asal akan "diuji dan dievaluasi" melalui interaksi budaya di negara tujuan perantauan dalam bentuk akulturasi budaya, khususnya budaya majikan di luar negeri. Artinya secara tidak langsung, sadar atau tidak TKW bersama majikannya telah melakukan rekonstruksi gender terhadap pola relasi gender lokal yang dibawa TKW. Walaupun hal itu berjalan tanpa diantisipasi oleh penyelenggara program.

Penjelasan tentang hal ini dikemukakan secara langsung oleh TKW bahwa secara perlahan tapi pasti mereka memasuki kehidupan keluarga majikannya sesuai dengan arahan dan petunjuk majikannya. Tanpa disadari TKW sering membanding-bandingkan kehidupan keluarganya dengan majikannya, dan memuji cara kerja anggota keluarganya yang tidak *sexist* (pembagian kerja tidak didasarkan pada jenis kelamin).

Pengakuan ini menunjukkan, bahwa TKW mengidolakan pola relasi gender majikannya yang *androgini*. Ini berarti bahwa paling tidak pada tingkat kognitif dan afektif ada perubahan pola relasi gender dalam diri TKW secara konsepsional. Perubahan itu terjadi dari konsep feminin menjadi androgini. Lebih jauh, hal ini terbawa dalam kehidupan berkeluarga pasca TKW.

Sejalan dengan pendapat Adam (1976) dan Rice (1981) di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan identitas gender TKW telah dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya setelah merantau sebagai TKW ke negara tujuannya.

Mengacu pada pendapat Nainggolan (2002) tentang 4 teori yang menjelaskan pembentukan dan perkembangan gender, maka pergeseran pola relasi gender TKW ini lebih mengikuti konteks teori skema gender yang menggabungkan aspek-aspek terpenting dari teori belajar sosial dengan teori perkembangan kognitif dalam suatu kerangka mental untuk mengolah informasi sehubungan dengan kualitas perasaannya sebagai laki-laki atau perempuan.

Sebagaimana halnya teori perkembangan kognitif, teori ini berpegang pada tipe gender diakibatkan oleh proses mental seseorang, tetapi seperti teori belajar juga memandang skema itu dibangun dari pengalaman seseorang itu di dalam masyarakat. Artinya konsep gender TKW berubah dari feminin menjadi androgini karena proses mental TKW sebagai respon terhadap pola gender yang dilihat berdasarkan pengalamannya pada lingkungan yang baru di perantauannya.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Stompka (2005) bahwa warisan sosial berupa pola relasi gender lokal tersebut dapat berubah, dibentuk ulang atau dimodifikasi dalam kehidupan berikutnya. Perubahan tersebut dapat berlangsung sejalan dengan interaksi sosial yang dijalani dalam setiap sistem sosial, sehingga perilaku seseorang merupakan produk dari sistem sosial yang dijalaninya.

Perubahan (pergeseran) relasi gender ini berlangsung melalui proses transmisi budaya sebagaimana dijelaskan oleh Cavalli-Sporza & Feldman.

Fenomena pergeseran ini terjadi dalam konteks dan kualitas yang berbeda-beda pada setiap wilayah penelitian. Ini membuktikan bahwa posisi istri pasca TKW dapat memberikan ruang yang cukup untuk melakukan pembongkaran terhadap pola relasi gender lokal sebagaimana dikemukakan oleh Daulay (2001). Secara umum pergeseran pola relasi gender tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel1: Perubahan Pola Relasi Gender Keluarga Migran Pasca Migrasi Sebagai TKW

Keadaan sebelum menjadi TKW	Keadaan setelah menjadi TKW
Pola relasi gender lebih di dominasi *maskulin* dan *feminim* yang ditandai dengan : a. Pembagian kerja masih bersifat sexist dikotomis b. Isteri fokus terhadap sektor domestik c. Isteri tidak independen dalam membuat keputusan d. Suami meyakini nilai-nilai pemingitan terhadap isteri e. Suami tidak terlibat dalam sektor domestik f. Posisi isteri sebagai sub ordinasi sangat kelihatan g. Hubungan suami istri berbentuk *owner property* h. Pengasuhan anak tanggung jawab utama isteri	Pola relasi gender berubah, mengarah pada konsep *androgini*, yang ditandai dengan : a. Pembagian kerja cenderung tidak sexist dikotomis b. Isteri mulai terbuka pada sektor publik c. Isteri mlai independen dalam mengambil keputusan d. Suami mulai permisif ketika isteri masuk ke sektor publik e. Sebagian suami mulai terjun ke sektor domestik f. Posisi isteri sebagai mitra mulai kelihatan g. Hubungan suami istri mengarah ke bentuk *equal partner* h. Pengasuhan anak mengarahpada tanggung jawab bersama

Sumber : Diolah dari data lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

a. Pasca migrasi sebagai TKW, terjadi pergeseran pola relasi gender lokal dengan segala hegemoni pathriarkinya. Pergeseran terjadi dari feminin ke androgini sejalan dengan teori skema gender.

b. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan semacam *redefinisi* terhadap keberadaan progaram TKW dari sisi pendekatan kebijakan sosial, dengan mencoba menerjemahkan berbagai nilai kepada konsep dan indikator kebijakan. Penegasan ini kiranya cukup beralasan, mengingat hingga saat ini program pengiriman TKW ke luar negeri terlalu didominasi "motif pendekatan bisnis" yang didefinisikan secara bebas sesuai dengan selera kepentingan kelompok kapitalis.

c. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus dipandang sebagai persoalan sosial budaya dalam arti luas secara strategis, yang harus dimanfaatkan tidak saja secara ekonomi tapi juga secara sosial budaya, dengan mengakomodasi berbagai persepektif nilai kemanusiaan.

d. Kepada Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja bersama LSM terkait di harapkan dapat memberikan konseling dan atau pelatihan bagi keluarga calon TKW menyangkut materi pola relasi gender dan persoalan sosial budaya lainnya, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sehubungan dengan kepergian dan kepulangan isteri sebagai TKW, sebagai upaya meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, JF, (1976), *Understanding Adolescence Current Developments in Adolescence Psychology*, Allyn and Bacon Inc, Boston.

Bem (1974), The Measurement of Psychologycal Androgyny.*Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42. 155-162.

Bem, S L, (1975), Beyond Androgyny: Some Presumtuous Prescriptions for a Liberated Sexual Identity. In J Sherman and F Denmark (Eds). *Psychology of Woman: Future Directions of Research*. Psychologycal Dimension in Press, New York.

Bem, S L, (1975), Sex Role Adaptibility One Consequence of Psychology Androgyny. *Journal of Personality and Social Psychology,31. 634-643.*

Bem, S L, (1977), On the Utility of Alternative Procedures for Assessing Psychologycal Androgyny. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 45. 196-205.

Berry dkk, (1999), *Psikologi Lintas Budaya,Riset Dan Aplikasinya* (terjemahan Edi Suhardono),Gramedia, Jakarta.

Daulay, Harmona,(2001), *Pergeseran Pola Relasi Gender Keluarga Di Keluarga Migran, Studi kasus TKIW di kecamatan Rawamarta Kab.Karawang Jawa Barat*. Galang Press,Yogyakarta.

Departemen Sosial RI, (2004), *Kajian PengembanganPembangunan Kesejahteraan Sosial Bernuansa Gender di Era otonomi Daerah*, Badan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Sosial-Departemen Sosial RI, Jakarta.

Eysenck, H J, Arnold, W, & Meili, R,(1972), *Encyclopedia of Psychology Volume One A to F, Volume Two to Phar, Volume Three Phas to Z*, Herder and Herder, New York.

Goode,William, J,(1985), *Sosiologi Keluarga*, Bina aksara,Jakarta.

Hurlock, E B, (1999), *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. (Terjemahan : Istiwidayanti & Soejarwo)*, Erlangga, Jakarta.

Kaplan, A G & Bean, J P (1976), *Beyond Sex Role Stereotypes. Reding Toward A Psychology of Androgyny*, Little Brown and Company, Boston.

Kartika (2005), *Jurnal Dayasos*, Depsos RI, Jakarta.

Lamke, K L, (1982), Adjusment and Sex Role Orientations in Adolescence. *Jornal of Youth and Adolescence*, 11, 247-259.

Nainggolan,Togiaratua, (2000) Kompetensi Interpersonal Remaja Panti Asuhan Ditinjau Dari Konsep Diri, Peran Jenis, dan Jenis Kelamin. *Tesis(tidak diterbitkan)*. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Rice, F P, (1981), *The Adolescent, Deelopment, Relationship, and Culture (3 rd ed)*, Allyn and Bacon Inc, Boston.

Spence, J T & Helmreich, R L, (1978), Androgyny versus Gender Search. A Comment on Bern's Gender Scheme Theory. *Psycologycal Review*, 88, 365-368.

Sztompka, Piotr, (2005), Sosisologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta.

BIODATA PENULIS :

Togiaratua Nainggolan, Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.